|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| agam | **FORMULIR**  **PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL** | **No. Dokumen : FM-PZ2-01-C03**  **Revisi : 01**  **Tgl. Effektif : 19 Maret 2018** |

Permohonan ini disampaikan kepada Instansi Penyelenggara PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSPBKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/ PTSP KEK)\* untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas rencana /realisasi penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalamIzin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan,dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan : .....................................................................

Perizinan yang akan diubah : .....................................................................

*(diisi dengan nomor dan tanggal perizinan)*, sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KETENTUAN | SEMULA | MENJADI |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*\*) pilih salah satu*

*Catatan:*

*diisi dengan ketentuan yang akan diubah*

*semula: adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan yang dimiliki*

*menjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan*

Alasanperubahan: ......................

**PERNYATAAN**

Bahwasaya, nama : ………………………............., dalam kapasitas saya sebagai

Pimpinan Perusahaan PT .............................................. dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak diatas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. | Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan, |  |
| b. | Kesesuaian seluruh rekaman /fotokopi data | Yang disampaikan dengan |
|  | Dokumen aslinya, dan |  |

c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

…………………………..,……….20……..

Pemohon,

Tanda Tangan dan

Stempel Perusahaan

Meterai Rp.6.000,-

……………….………………

Nama dan Jabatan Penandatangan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan :

a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;

b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;

c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;

d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN:

1.RekamanIzinPrinsip/IzinUsaha/IzinUsaha Perluasan, danseluruhperubahannya;

2.Rekamanaktapendirianperusahaandanperubahannya,dilengkapidenganpengesahandanpersetujuan/pemberitahuanperubahandariMenteriHukumdanHAM;

3.Datapendukunguntukperubahanyangdimohonkan, antaralainjikaterjadiperubahan:

a.NamaPerusahaan,agarmelampirkan:

1)RekamanRisalahRapatUmumPemegangSaham(RUPS);atau

2)KeputusanSirkularyangditandatanganiolehseluruhpemegangsahamdantelahdicatat(*waarmerking*)olehNotaris;

3)BuktipemesanannamaData IsianAktaNotaris(perubahan)dengan statusditerimaolehKementerianHukumdanHakAsasiManusia.

b.Alamatperusahaan,agarmelampirkan:

1)SuratKeteranganDomisiliPerusahaan;dan/atau

2)Perjanjiansewa-menyewaantaraperusahaandanpihakpengelolagedung;

c. NomorPokokWajibPajak(NPWP),agarmelampirkanrekamanNomorPokok

WajibPajak(NPWP)yangbaru.

d.Bidangusahadanjenisproduksi,agarmelampirkanrencanakegiatan:

1)untukindustri,berupadiagramalirproduksi(*flowchartof production*) dilengkapidenganpenjelasan detail uraianprosesproduksidenganmencantumkanjenisbahanbaku;

2)untuksektorjasa,berupauraiankegiatanyangakandilakukandanpenjelasanprodukjasayangdihasilkan;

e. Modalperseroan,agarmelampirkan:

1)RekamanRisalahRapatUmumPemegangSaham(RUPS),atau

2)KeputusanSirkularyangditandatanganiolehseluruhpemegangsaham

dantelahdicatat(*waarmerking*)olehNotaris, atau

3)RekamanPernyataanKeputusanRapat/BeritaAcaraRapatdalambentukAktaNotaris,yangmemenuhiketentuanPasal21danBabVIUndang- UndangNomor40Tahun2007tentangPerseroanTerbatas, dilengkapidenganbuktidiripemegangsahambaru;

f. Penyertaandalammodalperseroan,agarmelampirkan:

1)Kesepakatanparapemegangsahamtentangperubahanpenyertaandalam

modalperseroan,dalambentuk:

a)RekamanRisalahRapatUmumPemegangSaham(RUPS),atau

b)KeputusanSirkularyang ditandatanganiolehseluruhpemegang

saham,atau

c) RekamanPernyataanKeputusanRapat/BeritaAcaraRapatdalambentukAktaNotaris,yangmemenuhiketentuanPasal21danBabVI Undang-UndangNomor40Tahun2007tentangPerseroanTerbatas, dilengkapidenganbuktidiripemegangsahambaru;

2)buktidiripemegangsahambaru,dalambentuk:

a)dalamhalpemegangsahamadalahPemerintahNegaraLain,wajib

melampirkansuratdariinstansipemerintahnegarayangbersangkutanatausuratyangdikeluarkanolehKedutaanBesar/kantorperwakilannegarayangbersangkutandiIndonesia;

b)dalamhalpemegangsahamadalahperseoranganasing, agar melampirkanrekamanpasporyangmencantumkandenganjelasnama, tandatanganpemilikpasporsertamasaberlakupaspor;

c) dalamhalpemegangsahamadalahbadanusahaasing,agar melampirkanrekamananggarandasar(*article of association*)dalambahasainggrisatauterjemahannyadalamBahasaIndonesia daripenterjemahtersumpahataudilegalisasiolehperwakilanRepublikIndonesiadiluarnegeri;

d)dalamhalpemegangsahamadalahperseoranganIndonesia, agar

melampirkanrekamanKartuTandaPenduduk(KTP) yang masihberlakudanrekamanNomorPokokWajibPajak(NPWP);

e) dalamhalpemegangsahamadalahbadanhukumIndonesia agar

melampirkanrekamanAktaPendirianPerusahaandanperubahannyalengkapdenganpengesahandanpersetujuan/pemberitahuandariMenteriHukumdanHakAsasiManusiasertarekamanNomorPokokWajibPajak(NPWP)perusahaan.

3)kronologispenyertaandalammodal perseroansejakpersetujuan/izin BKPMyangtelahdiaktakandanmendapatpengesahandariMenteriHukumdanHAMterakhirsampaidenganpermohonanyangdiajukan.

g. Namabadanhukumpemegangsaham, agar melampirkanamandemenperubahannama/*certificatechangeofname*atausejenisnya.

4.RekomendasidariinstansiPemerintahterkaitapabiladipersyaratkan;

5.RekamanLaporanKegiatanPenanamanModal(LKPM)periodeterakhir;

6.Hasilpemeriksaanlapanganapabiladiperlukan.

LAMPIRANPERUBAHANIZINUSAHA:

1.RekamanIzinUsaha/IzinUsaha Perluasan/ IzinPerluasanyang dimilikiperusahaan;

2.Rekamanaktapendirianperusahaandanperubahannya,dilengkapidenganpengesahandanpersetujuan/pemberitahuanperubahandariMenteriHukumdanHAM;

3.Datapendukunguntukperubahanyangdimohonkan, antaralainjikaterjadiperubahan:

a.LokasiProyek,agarmelampirkan:

1)SuratKeteranganDomisili*(lokasiterbaru)*;

2)Rekamanbuktipenguasaantanahdan/ataubangunan*(lokasiterbaru)*

berupa:

**-** Rekamanaktajualbeliatasnamaperusahaan;

**-** RekamansertifikatHakatastanah;

**-** RekamanIzinMendirikanBangunan(IMB);

**-** Rekamanperjanjiansewamenyewatanahdan/ataubangunan;

**-** Rekamanperjanjianpinjampakai;

3)Rekamandokumendanpersetujuan/pengesahanAnalisisMengenaiDampakLingkungan (AMDAL)atauUpayaPengelolaanLingkungan (UKL) dan UpayaPemantauanLingkungan(UPL) atauSuratPernyataanKesanggupanPengelolaandanPemantauanLingkunganHidup(SPPL) *(lokasiterbaru)*;

4)Persyaratanlainsebagaimanadiaturdalamperaturandaerahsetempat.

b.Ketentuanbidangusaha \

mencakup(jenisproduksi, kapasitasdanpemasarandannilaiekspor):

1)Uraianprosesproduksi(*flowchart*);

2)KalkulasiKapasitasProduksi;

3)Dokumenpendukunglainterkaitperubahan(PIB,datateknismesin,dan

lain-lain).

c. MasaBerlakuizinusaha.

4.RekomendasidariinstansiPemerintahterkaitapabiladipersyaratkan;

5.NomorPokokWajibPajak(NPWP),agarmelampirkanrekamanNomorPokok

WajibPajak(NPWP)yangbaru;

6.RekamanLaporanKegiatanPenanamanModal(LKPM)semesterterakhir;

7.Hasilpemeriksaanlapanganapabiladiperlukan.